

# UPAYA DIPLOMASI KOREA SELATAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN EKONOMI DENGAN TIONGKOK PASCA PEMASALAHAN *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD)*

Made Cynthia Paramitha<sup>1)</sup>, A.A. Ayu Intan Parameswari<sup>2)</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: madc240@gmail.com<sup>1)</sup>, prameswari.intan@gmail.com<sup>2)</sup>, aabasuwinu@gmail.com<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to describe South Korea's efforts to improve economic relations with Tiongkok after the economic sanctions imposed by Tiongkok on South Korea due to South Korea's decision to install a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in South Korea. This research uses qualitative methods with literature study and secondary data. This study uses the concepts of foreign policy and diplomacy to see South Korea's diplomatic efforts to improve economic relations with Tiongkok. The results of this study indicate that South Korea's diplomatic efforts to improve economic relations with Tiongkok are based on South Korea's economic interests towards Tiongkok, which is South Korea's largest trading partner which controls a quarter of South Korea's total export volume. The conclusion of this research is that South Korea's diplomatic efforts to improve relations with Tiongkok were carried out by communicating and negotiating in various meetings with Tiongkok.*

**Keywords:** *South Korea, Tiongkok, Diplomacy, THAAD.*

## 1. PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Tiongkok mulai terbentuk pada tahun 1992 pasca berakhirnya Perang Korea. Hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin dengan baik yang dapat dilihat dari berbagai kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh masing-masing kepala negara, misalnya pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan ke-10, Lee Myung-bak berada di Tiongkok dalam rangkaian kunjungan tiga hari yang banyak membahas soal stabilitas Semenanjung Korea dan upaya meningkatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Dalam bidang ekonomi, kedua negara ini merupakan negara yang sama-sama tergabung dalam *Regional*

*Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Pada tahun 2015, hubungan Korea Selatan dan Tiongkok semakin dipererat dengan ditandatanganinya *Free Trade Agreement (FTA)* dan tahap pertama dilaksanakan pada 20 Desember 2015. Perjanjian FTA akan membuka arus investasi dan perdagangan yang lebih mudah bagi kedua negara. Dalam perekonomian Korea Selatan, Tiongkok menjadi mitra dagang prioritas bagi perdagangan Korea Selatan dengan menjadikan Tiongkok sebagai tujuan ekspor utama Korea Selatan. Perekonomian Tiongkok yang berkembang pesat dan menjadi *the rising great power* menjadi keuntungan bagi Korea Selatan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan

Tiongkok. Tiongkok merupakan penyumbang 25% dari total volume ekspor Korea Selatan dengan total perdagangan bernilai sekitar US \$ 234,5 Miliar pada tahun 2014 (China Briefing, 2015).

Beberapa tahun belakangan ini, Korea Utara semakin agresif dalam melakukan pembangunan serta melakukan uji coba nuklirnya yang menimbulkan adanya kekhawatiran bagi Korea Selatan dan Tiongkok sebagai negara yang berbatasan dengan Korea Utara. Untuk melindungi keamanan nasionalnya, pada tanggal 7 Juli 2016 Korea Selatan mengumumkan kesepakatan dengan Amerika Serikat sebagai aliansinya untuk menempatkan sistem anti rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan yang pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2017. Meskipun mengalami penolakan dari masyarakat setempat karena dinilai dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena radiasi yang ditimbulkan, pemerintah Korea Selatan tetap bersikukuh pada keputusannya untuk menempatkan THAAD di Korea Selatan. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkannya ke *Lotte Skyhill Seongju Country Club* di Seongju yang memiliki letak lebih jauh dari permukiman warga dan memiliki letak yang lebih tinggi untuk meredam kekhawatiran masyarakat. Pembangunan THAAD dimulai pada bulan Maret 2017 dengan dua dari enam misil THAAD telah dapat digunakan sejak Mei 2017. Adapun *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) merupakan sistem pertahanan rudal anti-balistik yang dikembangkan oleh perusahaan pembuatan

senjata *Lockheed Martin*. Dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan ini diharapkan mampu meredam ancaman rudal Korea Utara dan membantu Korea Selatan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan nuklir yang datang dari Korea Utara.

Sebagai salah satu negara yang memiliki letak geografis yang cukup berdekatan dengan Semenanjung Korea, Tiongkok justru menyatakan penolakannya terhadap adanya penempatan THAAD di Seongju, Korea Selatan. Meskipun Tiongkok menyatakan penentangannya terhadap uji coba nuklir Korea Utara, namun Tiongkok juga menganggap bahwa penempatan THAAD di Korea Selatan justru akan berpotensi menjadikan kondisi di kawasan tersebut semakin memanas. Menteri Luar Negeri Tiongkok juga memperingatkan bahwa penempatan THAAD akan mengurangi kepercayaan antara dua negara. Berdasarkan asumsi yang diyakini oleh Tiongkok bahwa keberadaan THAAD di Korea Selatan tersebut dapat mengancam teritorial, dan juga dapat mendeteksi sistem pertahanan negaranya (Habiburrahman, 2017:11). Selain itu pula, Tiongkok berpandangan bahwa dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan akan memperkuat dan melanggengkan hubungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Hal ini mengingat antara Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang saling bersaing serta memiliki hubungan yang cukup buruk beberapa tahun belakangan. Tiongkok tidak menginginkan adanya pengaruh Amerika Serikat yang semakin kuat di kawasan Asia Timur. Berdasarkan pada beberapa hal

tersebut, dapat dikatakan bahwa kepentingan keamanan Tiongkok merupakan dasar atas sikap Tiongkok dalam melakukan penolakan terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Timur menjadi ancaman bagi eksistensi dan keamanan Tiongkok.

Tiongkok telah beberapa kali menyatakan penolakannya terhadap penempatan THAAD namun tetap tidak mendapatkan pertimbangan dari Korea Selatan. Tiongkok mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan Korea Selatan dan menyatakan akan mengambil sikap tegas untuk kepentingan keamanan nasionalnya terkait dengan penempatan THAAD yang dinilai melanggar kedaulatan teritorial Tiongkok. Sebagai rekan dagang terbesar Korea Selatan, Tiongkok menggunakan kekuatan ekonominya untuk menghukum bisnis Korea Selatan ketika sistem antirudal tersebut disebar (Matamata Politik, 2017). Tiongkok menjatuhkan sanksi ekonomi dengan melakukan boikot pada beberapa sektor ekonomi misalnya pada pelarangan produk-produk *entertainment* Korea Selatan, pemberhentian impor kosmetik Korea Selatan, menurunnya nilai ekspor produk Kia dan Hyundai, melakukan boikot pada gerai Lotte Group di Tiongkok, dan melakukan boikot pada sektor pariwisata Korea Selatan. Sejak kesepakatan Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menempatkan THAAD di Korea Selatan pada bulan Juli 2016, Tiongkok telah secara perlahan menerapkan sanksi ekonomi berupa boikot produk-produk Korea Selatan dimulai sejak Agustus 2016. Sikap Tiongkok

menunjukkan bahwa Tiongkok sangat tegas terhadap keputusannya untuk menentang adanya penempatan THAAD di Korea Selatan yang dinilai sangat mengancam keamanan strategis Tiongkok.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Tiongkok terhadap beberapa sektor ekonomi nyatanya cukup berdampak buruk terhadap perekonomian Korea Selatan, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi sasaran Tiongkok. Menurut data dari *South Korea Hyundai Research Institute*, pada 2017 kerugian yang ditanggung oleh Korea Selatan mencapai US\$7.5 miliar yang setara dengan 0,5% dari PDB negara hingga akhir 2017. Kerugian juga terjadi pada industri hiburan dan budaya yang disebabkan adanya penurunan surplus hingga mencapai 23,2% yang setara dengan US\$5.3 juta (China Daily, 2017). Menurut *Korean Tourism Organization*, kunjungan wisatawan Tiongkok pada tahun 2017 menurun 48,3%, menjadi 4,17 juta orang akibat tindak balasan pemerintah Tiongkok atas penempatan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan (KBS World Radio, 2018). Total kerugian dari sektor pariwisata mencapai 84% dari total kerugian Korea Selatan akibat sanksi Tiongkok pada tahun 2017 dan menjadi sektor yang paling mengalami kerugian (China Daily, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Tiongkok menyebabkan terjadinya penurunan jumlah wisatawan yang datang dari Tiongkok mengingat Tiongkok merupakan penyumbang wisatawan terbesar dalam pariwisata Korea Selatan.

Permasalahan THAAD ini mengakibatkan memburuknya hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Tiongkok yang turut mempengaruhi hubungan ekonomi kedua negara. Pasca terpilihnya Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan pada 10 Mei 2017, pemerintah Korea Selatan mulai membangun kembali hubungan yang telah rusak dengan Tiongkok. Posisi Tiongkok yang penting bagi perekonomian Korea Selatan menjadikan Korea Selatan berupaya untuk memperbaiki hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Pada tanggal 31 Oktober 2017, menteri luar negeri kedua negara mengumumkan bahwa Korea Selatan dan Tiongkok bersepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Pasca kesepakatan normalisasi antara kedua negara, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan mulai melonggar dan secara bertahap dihentikan. Sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan sehingga Tiongkok mulai membuka kembali sanksi ekonomi yang dijatuhkannya secara bertahap. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik sebuah rumusan permasalahan yakni, bagaimana upaya diplomasi Korea Selatan memperbaiki hubungan ekonomi dengan Tiongkok pasca permasalahan *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini merujuk kepada dua tulisan ilmiah sebagai literatur yang menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Tulisan pertama berjudul *“Asymmetrical Interdependence and Sanction:*

*China’s Economic Retaliation over South Korea’s THAAD Deployment”* yang ditulis oleh Florence (Wen-Ting) Yang (2019). Tulisan kedua yaitu *“Economic Interdependence and Peace: A Game-Theoretic Analysis”* oleh Brett V. Benson dan Emerson M. S. Niu (2007). Kedua tulisan ini diharapkan mampu membantu penulis mengarahkan analisis dan memahami lebih lanjut mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis upaya diplomasi Korea Selatan memperbaiki hubungan ekonomi dengan Tiongkok pasca permasalahan THAAD.

Literatur pertama yaitu *“Asymmetrical Interdependence and Sanction: China’s Economic Retaliation over South Korea’s THAAD Deployment”* yang ditulis oleh Florence (Wen-Ting) Yang (2019), memaparkan mengenai bagaimana peningkatan ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok menjadi kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Tulisan ini membantu peneliti untuk memahami lebih jauh mengenai hubungan ekonomi yang terjadi di antara Korea Selatan dan Tiongkok. Adanya ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok dapat dilihat dari angka ekspor dan perdagangan Korea Selatan ke Tiongkok. Namun, di dalam tulisan ini belum menjelaskan mengenai pengaruh adanya ketergantungan ekonomi di antara kedua negara tersebut menyangkut kebijakan luar negeri yang diambil oleh Korea Selatan terkait dengan sanksi ekonomi. Untuk itu, peneliti menambahkan literatur kedua mengenai pengaruh hubungan bilateral dengan Tiongkok terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

Literatur kedua, yaitu *“Economic Interdependence and Peace: A Game-Theoretic Analysis”* oleh Brett V. Benson dan Emerson M. S. Niu (2007), membahas mengenai bagaimana hubungan ekonomi Tiongkok dan Taiwan mempengaruhi hubungan politik di antara kedua negara. Tulisan ini membantu peneliti dalam memahami keterkaitan interdependensi ekonomi dengan konflik perdamaian. Literatur ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat kemungkinan yang diambil suatu negara dalam menghadapi suatu ancaman terkait dengan ekonomi dan politik suatu negara. Studi kasus dalam Benson & Niu (2007) dengan kasus dalam penelitian ini memiliki kesamaan permasalahan sehingga dapat menjadi acuan bagaimana kemudian Korea Selatan dengan kepentingan ekonominya dalam menyikapi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Tiongkok sehingga literatur kedua ini membuat kajian pustaka ini tepat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2008) dalam Semiawan (2010:7) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Adapun jenis penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang searah dengan rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui

situs-situs daring yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal sosial politik.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KEPENTINGAN KOREA SELATAN TERHADAP TIONGKOK PASCA TERPILIHNYA PRESIDEN MOON JAE IN**

Pada 10 Mei 2017, Moon Jae In terpilih menjadi presiden ke-12 Korea Selatan menggantikan Park Geun Hye. Sejak masa kampanyenya, Moon Jae In bersama dengan Partai Demokrat yang mengusungnya selalu menyuarakan ketidaksetujuannya atas penempatan THAAD di Korea Selatan. Moon Jae In juga mengkritisi pemerintahan Park Geun Hye yang dinilai tergesa-gesa dalam penempatan THAAD di Korea Selatan.

Di bawah pemerintahan Moon Jae In, Korea Selatan melanjutkan kebijakan *Sunshine Policy* untuk mengatasi masalah nuklir dengan Korea Utara dan mengedepankan dialog serta pertukaran budaya dan ekonomi untuk memperbaiki hubungan antar Korea. Kebijakan luar negeri Korea Selatan berfokus pada terciptanya perdamaian di kawasan Semenanjung Korea. Dalam pencapaian kepentingan nasionalnya, Korea Selatan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara *partner* melalui diplomasi. Oleh sebab itu, dalam permasalahan nuklir Korea Utara, Korea

Selatan lebih menekankan untuk diselesaikan melalui jalur diplomasi.

Sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan, tentu saja menjadikan adanya kepentingan ekonomi dari Korea Selatan terhadap Tiongkok yang menjadi alasan Korea Selatan untuk berupaya memperbaiki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Tiongkok juga banyak menyumbang arus investasi ke Korea Selatan. Pada industri budaya Korea Selatan, Tiongkok telah sejak lama menjadi pasar unggulan bagi industri budaya Korea Selatan, penggunaan istilah hallyu bahkan berasal dari Tiongkok. Adanya kedekatan geografis serta kesamaan nilai yang dianut memudahkan produk hallyu untuk di terima di pasar Tiongkok. Dalam bidang pariwisata, Tiongkok merupakan negara penyumbang wisatawan terbesar ke Korea Selatan. Meskipun beberapa tahun sebelumnya Tiongkok berada sedikit di bawah Jepang, namun sejak 2013, Tiongkok menempati urutan pertama penyumbang wisatawan terbesar ke Korea Selatan bahkan melewati berkali-kali lipat di atas Jepang (Permatasari, 2018:39). Wisatawan yang berasal dari Tiongkok juga merupakan *big spender* dimana turis-turis tersebut berwisata dan menghabiskan uang mereka untuk berbelanja di Korea Selatan.

Ketergantungan ekonomi Korea Selatan dapat terlihat dari Tiongkok yang merupakan pasar ekspor terbesar yang menyumbang 25% dari pendapatan tahunan Korea Selatan. Pada tahun 2016, ekspor Korea Selatan ke Tiongkok mencapai \$124 miliar dan berada satu urutan di atas Amerika Serikat sebagai pasar kedua ekspor Korea

Selatan (Meick & Salidjanova, 2017: 8). Posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki kepentingan ekonomi terhadap Tiongkok. Kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh Korea Selatan terhadap Tiongkok menjadikan Korea Selatan berupaya untuk normalisasi hubungan bilateral pasca permasalahan THAAD. Dalam kaitannya dengan konsep kebijakan luar negeri pada kerangka pemikiran, dapat kita lihat bahwa menurut K J Holsti dalam tulisan Husna (2012:10), menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kepentingan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok mendorong Korea Selatan untuk membentuk kebijakan luar negeri untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Selain itu, dalam kerangka pemikiran dijelaskan bahwa diplomasi merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri sehingga dalam penelitian ini melihat diplomasi menjadi instrumen dari kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam mencapai kepentingan ekonomi terhadap Tiongkok.

#### **4.2. DIPLOMASI KOREA SELATAN UNTUK MEMPERBAIKI HUBUNGAN EKONOMI DENGAN TIONGKOK**

Untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok, Korea Selatan melakukan beberapa upaya diplomasi bilateral terhadap Tiongkok melalui metode

komunikasi dan negosiasi dengan meyakinkan Tiongkok bahwa THAAD bukan bertujuan untuk mengganggu keamanan strategis Tiongkok sehingga akan mendorong adanya normalisasi di antara kedua negara. Adapun negosiasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam upaya memperbaiki hubungan ekonomi dengan Tiongkok adalah sebagai berikut.

#### **a. Tahap *Pranegotiation***

Pasca dilantiknya Moon Jae In sebagai presiden ke-12 Korea Selatan, Presiden Xi Jin Ping menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Moon Jae In. Dalam percakapan telepon tersebut keduanya juga sepakat bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan tujuan bersama kedua negara. Presiden Moon Jae In menyatakan keprihatinannya dan sangat menyadari kekhawatiran Tiongkok mengenai sistem THAAD. Presiden Moon Jae In juga menyerukan diadakannya perundingan bilateral untuk menyatukan pemahaman terkait THAAD sehingga akan mencairkan hubungan kedua negara. Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk melakukan diplomasi bilateral terhadap Tiongkok untuk mengakhiri permasalahan terkait dengan penempatan THAAD di Korea Selatan dan memperbaiki hubungan ekonomi kedua negara.

#### **b. Tahap '*Around-the-Table*' *Negotiation***

Guna melancarkan upaya diplomasi Korea Selatan, dalam kurun waktu yang berdekatan dengan masa pelantikan Presiden Moon Jae In, pemerintah Korea Selatan mengirimkan delegasi khusus ke Tiongkok. Korea Selatan mengirimkan delegasi khusus untuk pertemuan "*One Belt, One Road*" yang diadakan pada 14-15 Mei 2017. Berdasarkan media dan hasil wawancara, dalam pertemuannya dengan pemerintah Tiongkok, Park Byung-seok, seorang delegasi dari Korea Selatan, menyatakan bahwa penyebaran THAAD tak dapat dihindari dan hal ini terkait dengan meningkatnya ancaman program nuklir Korea Utara (Ho, 2018: 80).

Korea Selatan kembali mengirimkan utusannya, mantan perdana menteri Lee Chan Hee ke Tiongkok pada 18-20 Mei 2017. Dalam pertemuan ini pemerintah Tiongkok menyampaikan keberatannya dengan mengkritik pemerintahan presiden sebelumnya terkait dengan keputusan pemasangan THAAD di Korea Selatan dan menuntut agar menghapuskan permasalahan bagi terjalannya hubungan bilateral kedua negara. Pada bulan Juni 2017, mantan perdana menteri Lee Chan Hee melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam rangka menghadiri

sebuah forum yang diselenggarakan oleh *Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia* (CICA). Dalam forum ini, perdana menteri Lee Chan Hee menyampaikan terkait tawaran untuk memperbaiki hubungan di antara kedua negara.

Dalam pertemuan KTT G-20 di Jerman, Presiden Moon Jae In dan Presiden Xi Jin Ping membahas mengenai pentingnya hubungan bilateral di antara kedua negara, namun dalam pertemuan kali ini belum menghasilkan kesepakatan untuk menghapus hambatan utamanya, yakni THAAD. Tiongkok menuntut agar Korea Selatan melindungi kepentingan Tiongkok. Di satu sisi, Korea Selatan masih perlu untuk mempertahankan THAAD mengingat berbagai ancaman yang ditimbulkan dari peluncuran rudal Korea Utara sangat menimbulkan kekhawatiran. Di sisi lain, Korea Selatan harus memperbaiki hubungan bilateral dengan Tiongkok mengingat posisi Tiongkok cukup penting dalam perekonomian Korea Selatan.

Hingga bulan Juni 2017, pemerintah Korea Selatan telah memasang dua dari empat baterai THAAD. Untuk menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, pemerintah Korea Selatan mengambil upaya menunda penerapan empat baterai THAAD yang tersisa sembari

menunggu hasil penilaian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan terkait dengan penempatan THAAD di Korea Selatan. Akan tetapi Korea Selatan terpaksa harus memasang empat baterai yang tersisa pasca Korea Utara kembali meluncurkan rudal Hwasung-14 ICBM miliknya pada 3 September 2017.

### **c. Tahap *Diplomatic Momentum***

Setelah beberapa kali pertemuan dan negosiasi dilakukan untuk meyakinkan pemerintah Tiongkok, pertemuan antara pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok dalam rapat Pemeriksa Keuangan oleh Majelis Nasional pada 30 Oktober 2017 menjadi titik terang dari permasalahan ini. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Wha menyatakan persetujuan terhadap poin *Three No's* yang diinginkan Tiongkok yaitu: 1) tidak ada pemasangan THAAD tambahan; 2) tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat; dan 3) tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang (Permatasari, 2018:4). Pemerintah Korea Selatan menyetujui tiga poin yang diinginkan oleh Tiongkok yang tertuang dalam kesepakatan *Three No's*.

### **d. Tahap *Packaging Agreement***



Pada 31 Oktober 2017, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kedua negara telah setuju untuk melakukan normalisasi hubungan untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi di antara kedua negara. Keputusan Korea Selatan untuk menyetujui permintaan Tiongkok yang tertuang dalam *Three No's* menunjukkan keseriusan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Dengan menyepakati *Three No's* Korea Selatan dapat memperoleh kembali kepercayaan dari Tiongkok dan mempertahankan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan.

Kesepakatan *Three No's* membuka jalan bagi Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan ekonomi di antara kedua negara. Tiongkok mendapatkan apa yang diinginkannya yang tertuang dalam poin-poin *Three No's*, sebaliknya Korea Selatan juga berhasil melakukan normalisasi hubungan dan mempertahankan hubungannya dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Korea Selatan.

#### **e. Tahap *Following Up***

Pasca terjadinya kesepakatan *Three No's* di antara Korea Selatan dan Tiongkok, Presiden Moon Jae In mengadakan pertemuan-pertemuan bersama dengan Presiden Xi Jin Ping

untuk membahas lebih lanjut terkait dengan normalisasi hubungan yang telah disepakati bersama.

#### **a) Pertemuan Presiden Moon Jae In dan Presiden Xi Jin Ping di Da Nang, Vietnam**

Pada tanggal 10-11 November 2017, Presiden Moon Jae In dan Presiden Xi Jin Ping mengadakan pertemuan di sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) 2017 di Da Nang, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk menata kembali keamanan di Semenanjung Korea dan menyelesaikan permasalahan Korea Utara secara damai (Ningrum, 2018: 54-55). Dalam pertemuan tersebut Korea Selatan menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Korea Selatan juga menyadari pentingnya hubungan bilateral dengan Tiongkok dan menghilangkan segala permasalahan yang mengganggu hubungan kedua negara.

#### **b) Pertemuan Presiden Moon Jae In dan**

### **Presiden Xi Jin Ping di Beijing, Tiongkok**

Pasca pertemuan antara Moon Jae In dan Xi Jin Ping di sela-sela KTT APEC di Da Nang, Vietnam pada November 2017, Presiden Moon Jae In melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk menghadiri KTT pada 13-16 Desember 2017 atas undangan dari Presiden Xi Jin Ping. Dalam pertemuannya kali ini, Presiden Moon Jae In meminta agar pihak Tiongkok menghidupkan kembali sektor bisnis Korea Selatan yang sebelumnya telah menderita akibat boikot yang diterapkan oleh Tiongkok (Permatasari, 2018: 46).

### **4.3. HUBUNGAN KOREA SELATAN DAN TIONGKOK PASCA PERTEMUAN**

Pada 22 Maret 2018, pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Tiongkok memulai kembali negosiasi mengenai jasa dan investasi dalam FTA (*Free Trade Agreement*). Korea Selatan dan Tiongkok kembali melakukan pertemuan komite ekonomi wakil menteri pada 20 April 2018 untuk pertama kalinya setelah dua tahun tidak dilaksanakan akibat permasalahan THAAD. Pertemuan ini diadakan untuk membahas agenda ekonomi dan perdagangan kedua negara secara keseluruhan. Dalam pertemuan ini kedua negara juga membahas mengenai akhir dari

aksi pelarangan Tiongkok terhadap sektor ekonomi Korea Selatan.

Pada tanggal 1 November 2017, program Korea Selatan mulai ditayangkan kembali di televisi Tiongkok. Selain itu, siaran televisi CCTV yang dikelola oleh pemerintah Tiongkok juga menayangkan program Olimpiade PyeongChang 2018 selama 30 menit dengan menekankan hubungan yang terjalin antara Korea Selatan dan Tiongkok (Ningrum, 2018:58). Bioskop-bioskop Tiongkok mulai memutar film-film dari Korea Selatan sejak 6 April 2018 pasca permasalahan THAAD yang mengakibatkan adanya larangan impor film Korea Selatan oleh Tiongkok. Selain itu, artis-artis Korea Selatan mulai aktif kembali di industri pertelevisian Tiongkok. Kembalinya tayangan serta artis-artis Korea Selatan dalam menghiasi layar kaca Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok telah membuka boikot terhadap produk-produk hallyu di Tiongkok.

Normalisasi hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok nyatanya turut memberikan titik terang bagi industri pariwisata Korea Selatan. Wakil Direktur di KTO dan eksekutif agensi travel Tiongkok, Park Yong Hwan, pada November 2017 menyatakan bahwa Tiongkok National Tourism Administration (CNTA) membuka izin penjualan paket tur ke Korea Selatan dari Beijing dan Shandong ke Korea Selatan. Akan tetapi penjualan online penerbangan *charter* atau *cruise trip* masih di larang. Boikot terhadap industri pariwisata resmi berakhir secara keseluruhan pada Mei 2018 setelah Tiongkok menghentikan larangan pariwisata

dari Provinsi Chongqing dan Hubei (Permatasari, 2018, 2018: 45). Dibukanya boikot pariwisata Korea Selatan oleh Tiongkok memberikan angin segar bagi pariwisata Korea Selatan mengingat Tiongkok menjadi penyumbang utama wisatawan ke Korea Selatan.

## 5. KESIMPULAN

Adanya kepentingan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok menjadikan Korea Selatan berupaya untuk memperbaiki kembali hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Pasca dilantikannya presiden Korea Selatan yang baru, Presiden Moon Jae In, pemerintah Korea Selatan mulai melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan ekonomi dengan melakukan diplomasi melalui negosiasi terhadap Tiongkok. Proses negosiasi ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni; a) Tahap *Pranegotiation*, dalam tahap ini Presiden Moon Jae In menyerukan untuk diadakannya perundingan bilateral untuk menyatukan pemahaman terkait THAAD melalui percakapan telepon dengan Presiden Xi Jin Ping; b) Tahap *'Around-the-Table' Negotiation*, dalam tahap ini Korea Selatan mengirimkan utusannya untuk menghadiri berbagai pertemuan kenegaraan yang juga dihadiri Tiongkok dengan tujuan meyakinkan

Tiongkok bahwa pemasangan THAAD adalah untuk perlindungan diri dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di antara kedua negara; c) Tahap *Diplomatic Momentum*, Korea Selatan pada 30 Oktober 2017 menyepakati poin Three No's yang diinginkan oleh Tiongkok; d) Tahap *Packaging Agreement*, pada 31 Oktober 2017 kedua negara sama-sama mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan kesepakatan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik; e) Tahap *Following Up*, dalam tahap ini kedua negara kembali melakukan kunjungan kenegaraan guna membahas berbagai kerja sama yang sebelumnya tertunda serta Korea Selatan meminta agar Tiongkok membuka boikot terhadap perekonomian Korea Selatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Berridge, G.R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice- 4<sup>th</sup> ed.* UK: Palgrave Macmillan.
- Basu, Rumki. (2012). *International Politics: Concepts, Theories and Issues*. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Ho, Chung Jae. (2018). *South Korea's Strategic Approach to Tiongkok (or Lack of It)*. Diakses 2 Oktober 2020, dari Joint U.S.-Korea Academic Studies: <http://keia.org/publication/south-korea's-strategic-approach-tiongkok-or-lack-it>